



Menara Balai Kota Tergantung Silpa

Ditunda, Defisit dalam APBD 2020 Jadi Enam Persen

JOGJA, Radar Jogja - Pembangunan gedung unit XI atau menara Balai Kota akhirnya ditunda. Itu untuk menghindari defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Jogja 2020.

Sebelumnya ada kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kota Jogja 2020 menganggarkan untuk proyek tahun jamak itu sebesar Rp 32,151 miliar. "Defisit tidak bisa dihilangkan tapi bagaimana kita bisa mengontrol itu," kata Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko usai rapat paripurna di DPRD Kota Jogja kemarin (23/10).

Dalam rencana pembangunannya, menara Balai Kota menghabiskan dana Rp 112,137 miliar. Alokasi tahun pertama mencapai Rp 32,151 miliar. Lalu pembangunan di 2021 mencapai Rp 79,986 miliar.

Danang menjelaskan setelah proyek itu ditunda pelaksanaannya dalam APBD 2020 maka defisit anggaran berada dalam batas aman enam persen. Perkiraan semula defisit dalam APBD 2020 mencapai 7,7 persen. "Dengan ketentuan ini kami akan menjaga ritmenya," ujar politikus PDIP itu.

Tapi Danang kembali menegaskan, rasionalisasi anggaran pembangunan menara Balai Kota tersebut jangan diartikan menofak. Tapi sebagai upaya menjaga kondisi fiskal dalam APBD Kota Jogja. "Fokus kami pada defisit anggaran dalam APBD," ungkapnya.

Salah satu yang menjadi perhatiannya terkait pendapatan. Dia menyebut untuk mengurangi defisit anggaran, salah satunya, dengan memaksimalkan pendapatan. Danang menyebut, jika hasil evaluasi nantinya bisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tinggi, pembangunan menara Balai Kota bisa dianggarkan dalam APBD 2020. "Kalau nanti atas dasar evaluasi itu silpa tinggi, kenapa tidak (dianggarkan dalam APBD perubahan 2020)," tambahnya.

Sedang Wali Kota Jogja, Harryadi Suyuti mengaku, pihaknya sepatutnya dengan lembaga legislatif itu untuk melihat rasionalisasi anggaran gedung unit XI kompleks Balai Kota. Termasuk untuk memaksimalkan pendapatan. "Nanti kami tunggu hasil pencerminan yang akan kami sampaikan minggu depan mengenai KUA-PPAS," kata HS.

HS menambahkan, berkaitan dengan defisit anggaran ini pihaknya akan melihat Silpa nantinya. Tapi dia berpesan Silpa yang tinggi karena berasal dari pendapatan. Bukan karena kegiatan yang tidak terlaksana. "Pada silpa itu berasal dari sisi *income* bukan penghematan anggaran," pesannya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadijaya memastikan perencanaan pembangunan menara Balai Kota sudah sejak lama. Bukan ditusulkan baru saja dengan melakukan penghematan anggaran dalam APBD. (cr15/pra/er)



SALAH SATU ALTERNATIF: Gambar maket salah satu alternatif bangunan menara Balai Kota atau unit XI.

Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers	

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005